

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

4.1. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi merupakan kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, memuat arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang terintegrasi dan berkelanjutan secara bertahap dituangkan dalam perencanaan pembangunan tahunan. Dengan Visi yang ingin dicapai adalah:

“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi

didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

Secara komparatif, Provinsi Lampung didukung oleh letak geografis yang strategis dan ketersediaan sumber daya alam serta pertanian yang handal. Secara kompetitif, dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maka ketersediaan SDM berkualitas dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, namun tentu saja tetap memperhatikan jatidiri yang berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dengan tingginya kualitas SDM maka proses pemberdayaan ekonomi rakyat akan terjadi secara alamiah yang pada akhirnya akan mendorong sector pembangunan.

Provinsi Lampung memiliki birokrasi pemerintah yang bersih bebas korupsi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang berorientasi melayani. Birokrasi pemerintah yang visioner akan menjadi faktor pendukung jika didorong dengan kebijakan, fasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Birokrasi pemerintah daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah dimana pemerintah mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang berkemandirian dan berkeadilan sosial, politik, hukum, ekonomi serta disokong oleh proses demokratisasi. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung yaitu menjadikan Provinsi Lampung lebih makmur dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Lampung yang makmur yaitu Lampung yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang *civilized* dan berkeadilan (*justice for all*) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Provinsi Lampung merupakan daerah sejahtera dengan budaya luhur. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah

penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Tanah *Sai Bumi Ruwa Jurai*, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014—2019 tersebut, disusun 5 (lima) misi dan agenda kerja sebagai berikut:

Misi-1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sector dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke

ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Penciptaan daya saing berkelanjutan merupakan perkuatan ekonomi sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah produk dan penguatan kemandirian daerah yang diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Misi-2: Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur

yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan social bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Misi-3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai IPTEKS, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat yang kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan social yang memadai.

Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi, direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu : 1. Pi'il pesengiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan Lampung menitikberatkan pada pemaknaan budaya yang konstruktif, transformative, kreatif, dan produktif serta

bernilai social dan ekonomi yang tinggi. Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis (beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur).

Misi-4: Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan social ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, social dan wilayah pemukiman.

Misi-5: Menegakkan supremasi hokum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pematapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran

masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.

Juga upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, momentum otonomi luas tersebut memberikan diskresi yang tinggi kepada daerah untuk menentukan pengembangan otonominya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal dalam batas wilayahnya sendiri. Konsekuensi logis dari manifestasi otonomi luas tersebut adalah bahwa daerah harus mampu membangun kemandirian terutama dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun membiayai program-program pembangunan daerah, dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Mengingat salah satu tujuan dari desentralisasi itu sendiri adalah untuk memberikan kontribusi pada penyediaan pelayanan publik lokal yang lebih efisien dengan memungkinkan penyelarasan yang lebih baik antara pengeluaran dengan prioritas dan preferensi lokal.

Meskipun setelah 9 tahun otonomi dijalankan, masih banyak daerah yang belum mandiri, khususnya dari sisi pembiayaan pembangunan. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung kepada transfer (selanjutnya diartikan sebagai Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat. Dalam kerangka ideal, transfer ditujukan guna membantu menutup kesenjangan fiskal sekaligus sebagai dasar pertimbangan untuk dicapainya keseimbangan fiskal sekaligus sebagai dasar pertimbangan untuk dicapainya keseimbangan fiskal secara vertikal yang adil ketika pengeluaran dan pendapatan (termasuk transfer) dijadikan penyeimbang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sekaligus mengukur kapasitas masing-masing Pemda untuk meningkatkan sumber daya lokalnya.

Hal ini perlu dikemukakan mengingat ketersediaan "budget" menjadi asumsi utama mengapa Pemda harus merencanakan dan mengukur secara tepat skema-skema pembangunan yang akan dilakukannya. Dalam prinsip perencanaan dengan keterbatasan/kelangkaan sumberdaya yang dimiliki, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu pengarahannya mobilisasi kemungkinan-kemungkinan sumberdaya yang tersedia, sekaligus proyeksi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan serta alokasi dari sumber daya tersebut terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sedangkan pembangunan dalam pengertian yang lebih luas dipahami sebagai kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi kehidupan yang lebih baik lagi.

Berkaitan dengan hal itu pembangunan memiliki 3 (tiga) tujuan inti yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok (seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan);
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan;
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kerangka berpikir tersebut serta berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Bappeda sebagai "leading sector" perencanaan pembangunan menyusun program-program pembangunan dengan perspektif ke depan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi. Disisi lain, perencanaan program-program pembangunan daerah tersebut harus disusun sesuai dengan prosedur dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan memiliki keterkaitan mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Penyusunan perencanaan pembangunan pada tiap tingkatan diwajibkan melibatkan pihak terkait/pelaku kepentingan pembangunan lainnya. Keterlibatan

para pihak tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dimana secara legal formal dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan *output* dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Salah satu hasil kesepakatan musrenbang Provinsi Lampung tahun 2014 antara lain prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai bagian dari arah pembangunan tahun 2015.

Dengan kerangka berpikir tersebut serta berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 antara lain yaitu:

1. Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
2. Percepatan Pembangunan Bidang Pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
3. Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan;
4. Penguatan Inovasi Teknologi, Pemanfaatan IPTEK, Industri dan Perdagangan serta Energi Terbarukan;
5. Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan;
6. Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;
7. Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Tema, Prioritas Pembangunan nasional dalam RKPD Tahun 2015 adalah: **“Melanjutkan Reformasi Pembangunan untuk Peningkatan Daya Saing Nasional”**.

Tema pembangunan tersebut, terjabarkan dalam 3 bidang, sebagai berikut:

1. Bidang ekonomi, peningkatan nilai tambah sector produksi, percepatan pembangunan infrastruktur (connectivity) dan peningkatan iklim investasi.
2. Bidang kesejahteraan rakyat, pengurangan/pengentasan kemiskinan dan pencapaian target MDGs lainnya.
3. Bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, reformasi dan tata kelola dalam arti luas.

Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah: **“Pemantapan Perekonomian Daerah sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan visi misi Provinsi Lampung dan kondisi serta tantangan pembangunan tahun 2015, maka Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah;
2. Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan;
3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan,
4. Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industry dan perdagangan serta energy terbarukan;
5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan;
6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana;
7. Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor-sektor nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang disusun sesuai dengan karakteristik, potensi, aspirasi dan permasalahan yang ada ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai upaya terus-menerus dilakukan termasuk melakukan terobosan-terobosan baru melalui program-program unggulan daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor-sektor nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang disusun sesuai dengan karakteristik, potensi, aspirasi dan permasalahan yang ada ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai upaya terus-menerus dilakukan termasuk melakukan terobosan-terobosan baru melalui program-program unggulan daerah.

Pada tahun 2015, pembangunan diprioritaskan pada percepatan Implementasi program-program unggulan daerah seperti .:

1. Pengembangan infrastruktur perhubungan dan penanganan jalan akan diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis cepat tumbuh, pengendalian laju kerusakan jalan akibat beban angkutan yang berlebih,serta pemeliharaan infrastruktur irigasi, dan peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa tidak mampu dan beasiswa Program S2/S3 untuk para dosen dan tenaga kesehatan, pemantapan penerapan kurikulum 2015, pemerataan tenaga pendidik khususnya untuk daerah terpencil serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan guru honor di daerah terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut anggaran belanja pendidikan dialokasikan

meningkat dibandingkan Tahun 2014 atau tidak mengalami penurunan.

3. Peningkatan kualitas, optimalisasi manajemen, dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat miskin, serta pengembangan dan peningkatan sumber daya kesehatan.
4. Revitalisasi kawasan kumuh, daerah tertinggal, dan perumahan rakyat serta pembangunan sarana air bersih/air minum dan prasarana dasar permukiman.
5. Percepatan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kesejahteraan petani, dan daya saing daerah, dukungan terhadap akses permodalan lingkup pertanian dan pengembangan sistem distribusi daerah serta peningkatan SDM pertanian dan kelembagaannya.
6. Peningkatan peran perencanaan dalam pembangunan daerah melalui perkuatan jaring inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta peningkatan sinergitas dengan pemerintah pusat, Kabupaten/Kota, antar Provinsi, antar forum, dan antar pemangku kepentingan pembangunan.
7. Pengawasan dan pemantauan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
8. Perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender melalui peningkatan ekonomi produktif perempuan.
9. Pengembangan energi baru terbarukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi di daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi daerah.

10. Pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan wisata unggulan dengan dukungan infrastruktur dan sektor terkait secara terpadu serta pemberdayaan masyarakat sadar wisata.
11. Pengembangan potensi kelautan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengembangan produk komoditi unggulan yang berbasis ekonomi lokal.